

## Efektivitas Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan

Jenifa Biliyana Delila Kolo, Agustinus Longa Tiza, Yoakim Rembu, Dimas Agustian, Firdaus  
Universitas Timor, Timor Tengah Utara  
e-mail: [dimas.agustian.adm@unimor.ac.id](mailto:dimas.agustian.adm@unimor.ac.id)

### Abstrak

Perlindungan anak merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak usia 0-17 tahun adalah penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 2 Tahun 2016. Namun, efektivitas pelayanan KIA dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Timor Tengah Utara masih menjadi pertanyaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pelayanan KIA dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas adalah pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan KIA belum sepenuhnya efektif. Meskipun program ini didasarkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri No. 2 Tahun 2016, pencapaian tujuan belum optimal. Tantangan geografis di daerah terpencil menghambat distribusi layanan. Integrasi sistem administrasi dan koordinasi dengan instansi lain berjalan baik, tetapi sosialisasi yang kurang efektif, keterbatasan sumber daya, serta sulitnya akses ke daerah terpencil menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat. Meski terjadi peningkatan kepemilikan Kartu Identitas Anak dari tahun ke tahun, Adaptasi terhadap kebutuhan yang dinamis masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya media promosi dan keterbatasan sarana prasarana. Efektivitas pelayanan KIA di Kabupaten Timor Tengah Utara perlu ditingkatkan melalui perbaikan sosialisasi, penambahan pegawai, serta peningkatan aksesibilitas layanan di daerah terpencil.

**Kata Kunci:** Efektivitas, pelayanan publik, Kartu Identitas Anak.

### Abstract

*Child protection is an effort to guarantee and protect children's rights so that they can grow, develop, and participate optimally, and are protected from violence and discrimination. One form of legal protection for children aged 0-17 years is the issuance of a Child Identity Card (KIA) based on Minister of Home Affairs Regulation No. 2 of 2016. However, the effectiveness of KIA services in improving the orderly administration of population in North Central Timor District is still a question. This study aims to describe the effectiveness of KIA services in improving the orderly administration of population in the Population and Civil Registration Office of North Central Timor District. This study used a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The indicators used to assess effectiveness are goal achievement, integration, and adaptation. The results showed that the MCH service has not been fully effective. Although the program is based on Minister of Home Affairs Regulation No. 2 of 2016,*

*the achievement of objectives has not been optimal. Geographical challenges in remote areas hamper service distribution. Integration of administrative systems and coordination with other agencies is good, but ineffective socialization, limited resources, and difficult access to remote areas lead to low community participation. Although there has been an increase in ownership of the Child Identity Card from year to year, adaptation to dynamic needs still faces various obstacles, such as a lack of promotional media and limited infrastructure. The effectiveness of the KIA service in North Central Timor District needs to be improved through improved socialization, additional staff, and increased service accessibility in remote areas.*

**Keywords:** *Effectiveness, public service, Child Identity Card.*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, Pemerintah melalui instansi terkait, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) berupaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat 1 menyatakan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Realisasi penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan di antaranya dilaksanakan melalui penerbitan dokumen kependudukan sebagai upaya pendaftaran dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan yang kini dimiliki oleh tiap penduduk di antaranya seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan lain sebagainya.

Pemerintah Pusat untuk melaksanakan program kependudukan terbaru, yakni program Kartu Identitas Anak (KIA) sehingga, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang berusia dari 0 – 17 tahun dan dinyatakan belum menikah. Program KIA bagi anak yang berusia 0 sampai 17 tahun (kurang dari 1 hari) ialah dengan membuat perlindungan hukum yang dibuat pemerintah untuk dapat dengan mudah mengidentifikasi anak-anak yang ada di Indonesia, dan berdasarkan dokumen kependudukan KIA ini hak-hak sebagai anak dan sebagai warga negara di Indonesia dilindungi. KIA tidak hanya sekedar suatu identitas yang memuat keterangan tentang anak, namun KIA juga merupakan sarana bagi anak-anak dalam

memperoleh akses perlindungan hukum yang diberi oleh negara termasuk fasilitas pelayanan dan ruang pelayanan publik sehingga, anak-anak dapat dilindungi secara hukum dan mendapatkan sarana pelayanan publik yang baik di masyarakat. Tujuan Pemerintah menerbitkan KIA adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, khususnya bagi anak berusia kurang dari 17 tahun belum menikah, tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK).

Data di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sendiri menunjukkan bahwa laju perkembangan penduduk per tahun meningkat 1,25%. Pertumbuhan penduduk tersebut dinilai sudah sangat baik dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif. Namun melihat hal tersebut masih terdapat kendala yang perlu dihadapi oleh pemerintah yaitu pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, terutama di berbagai kabupaten/kota yang ada di provinsi NTT termasuk Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) sampai saat ini masih mengalami permasalahan berkaitan dengan dokumen administrasi kependudukan yang tidak sebanding dengan kuantitas penduduk yang terus mengalami penambahan setiap tahunnya. Disdukcapil Kabupaten TTU dalam melaksanakan pencatatan dan pendataan penduduk sering kali menemukan kendala yang mana pendataan kurang akurat karena penduduk berusia 17 tahun ke bawah belum mempunyai kartu terkait identitas diri.

Adapun di Provinsi NTT, program KIA juga dilaksanakan oleh Kabupaten TTU. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban program KIA ada pada Disdukcapil Kabupaten TTU, khususnya terkait upaya pendataan anak dan

penerbitan KIA. Menyadari pelaksanaan program KIA di Kabupaten TTU dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten TTU tentunya belum mendapatkan hasil sebagaimana yang ditargetkan. Sehingga belum optimalnya pelayanan program KIA yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten TTU, yang di mana ditunjukkan oleh data realisasi penerbitan KIA. Hal ini mengingat, salah satu ukuran efektivitas pelayanan program adalah pencapaian tujuan sasaran program. Data realisasi penerbitan KIA disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1. Realisasi Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten TTU Tahun 2022**

N o.	Tahun	Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun	Jumlah Anak Kepemilikan KIA	Jumlah Anak Non Kepemilikan KIA
1	2022	78.513	23.367	55.146 Anak
2	2023	89.439	28.252	61.187 Anak

Sumber: Disdukcapil Kabupaten TTU, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui Disdukcapil Kabupaten TTU memiliki pelaksanaan program kartu identitas anak (KIA) dengan usia 0-17 tahun yang di mana tercetak selama kurun waktu satu tahun terakhir. Pada Tahun 2022 jumlah anak dari usia 0-17 tahun berjumlah 78.513 anak, dari jumlah tersebut sebanyak 23.367 anak yang sudah memiliki KIA dan sisanya 55.146 anak yang belum memiliki KIA. Adapun pada Tahun 2023 jumlah anak usia 0-17 tahun sebanyak 89.439 anak, dari jumlah tersebut sebanyak 28.252 anak yang sudah memiliki KIA dan sisanya 61.187 anak yang belum memiliki KIA. Dari data diatas dapat dikatakan bahwa pada tahun 2023 dari 89.439 anak, yang sudah memiliki KIA sebanyak 28.252 anak dan sisanya 61.187 anak yang belum memiliki KIA, sehingga dengan kata lain pelaksanaan program KIA di Kabupaten TTU belum mencapai target yang diinginkan.

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan KIA di Disdukcapil Kabupaten TTU yaitu berdasarkan tabel 1.1 realisasi penerbitan KIA di atas dapat dikatakan bahwa belum tercapainya jumlah pencetakan KIA dengan jumlah anak yang berusia 0-17 tahun di Kabupaten TTU, sehingga adanya permasalahan lain yang timbul yaitu: keterbatasan sarana dan prasarana yang menghambat proses pelayanan. Dalam

pemberian pelayanan KIA sering kali mengalami hambatan dalam proses percetakan diakibatkan karena terbatas perangkat komputer dan alat printer KIA serta kurangnya pegawai tenaga kerja. Hal tersebut yang membuat masyarakat harus menunggu cukup lama sampai besok harinya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelayanan yakni masyarakat tidak bisa mendapatkan pelayanan dengan maksimal. Selanjutnya yaitu belum maksimalnya sosialisasi yang diberikan Disdukcapil Kabupaten TTU kepada masyarakat. Sosialisasi yang diberikan tidak berkelanjutan sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami terkait pentingnya KIA dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus KIA karena untuk wilayah Kabupaten TTU sekarang belum diterapkan wajib melampirkan KIA dalam berbagai proses registrasi misalnya: registrasi masuk sekolah, pembuatan rekening tabungan, dan BPJS sehingga, membuat masyarakat malas untuk mengurusnya.

Dari berbagai uraian dan permasalahan yang telah dijelaskan, untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Efektivitas Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara"

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini digunakan dengan maksud peneliti dapat mengumpulkan data-data yang terkait dengan permasalahan dengan cara melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi, penulis melakukan wawancara terhadap 4 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Seksi Bidang Penyajian Data dan Masyarakat (dalam hal ini masyarakat sebagai objek penelitian sebanyak 10 orang).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pelayanan kartu identitas anak di Kabupaten Timor Tengah Utara menggunakan pendapat dari Duncan

dalam Steers (1985: 53) yang menyatakan bahwa Efektivitas memiliki tiga dimensi, yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada sub-sub berikut ini:

### 1. Pencapaian Tujuan

Penulis melakukan pengukuran terhadap efektivitas dalam pelayanan kartu identitas anak melalui wawancara dengan para informan dan observasi, serta dokumentasi di lapangan. Program KIA di Kabupaten TTU sudah dilaksanakan sesuai dengan dasar hukum yang kuat, yaitu Permendagri No. 2 Tahun 2016. Dasar hukum ini memberikan landasan yang jelas dan kuat untuk pelaksanaan program. Namun, meskipun dasar hukum sudah memadai, pencapaian yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud yang dimana pencapaian program KIA seharusnya mengikuti tahapan yang terencana dengan baik, termasuk pengaturan kurun waktu, penetapan sasaran yang konkret, dan dasar hukum yang jelas. Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun sistem administrasi telah memadai, ada beberapa kelemahan dalam penerapan pencapaian tujuan pada program KIA di Kabupaten TTU. Implementasi mengindikasikan adanya masalah dalam perencanaan waktu pencapaian yang tidak cukup efektif, Peningkatan jumlah anak yang belum memiliki KIA menunjukkan bahwa sasaran konkret belum tercapai dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kepatuhan terhadap regulasi saja tidak cukup untuk memastikan efektivitas program; implementasi yang lebih baik terhadap tantangan yang ada juga diperlukan. Kurun waktu pencapaian program KIA di Kabupaten TTU menunjukkan bahwa meskipun ada upaya yang dilakukan, pencapaian tujuan masih jauh dari harapan. Dalam kurun waktu pencapaian, peningkatan Program KIA di Kabupaten TTU tergolong lambat dan tidak memenuhi ekspektasi yang ditetapkan dalam program. Sasaran program KIA adalah memastikan semua anak memiliki identitas hukum. Namun, dengan data yang menunjukkan bahwa lebih dari 60% anak usia 0-17 tahun masih belum memiliki KIA, pencapaian sasaran program ini belum optimal. Kesenjangan yang signifikan antara target yang ditetapkan dan pencapaian aktual mencerminkan bahwa strategi dan pelaksanaan program masih memerlukan perbaikan

substansial. Salah satu faktor penghambat utama adalah tantangan geografis, yang membuat distribusi layanan pembuatan KIA di daerah terpencil menjadi sulit.

### 2. Integrasi

Integrasi secara luas mengartikan sebuah proses atau cara penyatuan unsur-unsur yang berbeda agar saling keterkaitan sehingga sebuah tujuan atau pencapaian dapat berjalan sesuai. Dalam hal ini yaitu, Sistem administrasi kependudukan, termasuk SIAK, dan koordinasi antara Kantor Disdukcapil dengan puskesmas dan sekolah-sekolah telah menunjukkan tingkat integrasi yang baik. Sistem ini memungkinkan data kependudukan yang relevan, seperti KIA, untuk terintegrasi secara efektif dengan data lainnya, sehingga memudahkan proses verifikasi dan pembaharuan data. Namun, masalah utama terletak pada prosedur dan proses sosialisasi program KIA kepada masyarakat. Upaya sosialisasi oleh Disdukcapil tampaknya belum optimal, sebagaimana terlihat dari tingginya jumlah anak yang belum memiliki KIA hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya yang menghambat penyebaran informasi, kurangnya penggunaan media promosi seperti balinho, spanduk, dan brosur, serta aksesibilitas yang sulit di daerah terpencil. Selain itu, kurangnya kesadaran orang tua mengenai manfaat KIA dan keterlambatan dalam persiapan sosialisasi memperburuk efektivitas program, yang terlihat dari jumlah anak yang belum memiliki KIA. Integrasi menggarisbawahi pentingnya kemampuan organisasi untuk melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, meskipun sistem administrasi sudah memadai, ketidakefektifan sosialisasi dan koordinasi menjadi penghambat utama, mengindikasikan bahwa keberhasilan integrasi tidak hanya bergantung pada sistem yang ada, tetapi juga pada kemampuan organisasi untuk berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif.

### 3. Adaptasi

Dalam menilai efektivitas program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten TTU, peneliti menggunakan teori pengukuran efektivitas Duncan (dalam Steers, 2012; 53), yang terdiri dari beberapa indikator, salah satunya adalah adaptasi. Adaptasi dalam

penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menunjukkan kebutuhan untuk penyesuaian yang lebih baik terhadap lingkungan dan tantangan yang dihadapi. Meskipun ada peningkatan jumlah anak yang memiliki KIA dari 23.367 pada tahun 2022 menjadi 28.252 pada tahun 2023, tantangan signifikan dalam hal komunikasi, pemahaman prosedur, dan penerimaan masyarakat masih ada. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya media promosi yang memadai, serta akses yang sulit ke daerah terpencil mengindikasikan bahwa Disdukcapil TTU belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan perubahan kebijakan dan kebutuhan yang dinamis. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya mencakup peningkatan kemampuan dan sarana prasarana. Dalam konteks ini, Disdukcapil TTU perlu meningkatkan kualitas komunikasi publik, menambah pegawai khusus untuk pencetakan KIA, dan memperbaiki sarana prasarana seperti alat cetak KIA. Pengembangan strategi baru yang lebih efektif untuk merespons perubahan situasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta teknologi akan membantu organisasi dalam menghadapi tantangan yang ada dan memperbaiki efektivitas sosialisasi program KIA, sehingga tujuan utama program yaitu tertib administrasi kependudukan dapat tercapai secara maksimal. Dalam penelitian ini, analisis mengenai adaptasi dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menunjukkan bahwa, meskipun jumlah anak yang memiliki KIA meningkat dari 23.367 pada tahun 2022 menjadi 28.252 pada tahun 2023, tantangan dalam komunikasi dan pemahaman prosedur masih signifikan. Hambatan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya media promosi yang memadai, akses ke daerah terpencil, dan rendahnya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa Disdukcapil TTU belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan lingkungan dan tantangan yang ada. Kurangnya pegawai khusus dan sarana prasarana seperti alat cetak KIA juga menjadi masalah, yang mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas komunikasi publik dan strategi baru

untuk mendekatkan layanan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai efektivitas pelayanan Kartu Identitas Anak dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Tinor Tengah Utara dapat ditarik kesimpulan bahwa program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TTU belum sepenuhnya berjalan dengan efektif dengan dilihat dari hasil penelitian menggunakan teori efektivitas oleh Duncan dalam buku (Richard M. Streers, 2003 ), ditunjukkan melalui 3 (tiga) indikator, yaitu: Pencapaian tujuan, dalam hal ini dapat dibuktikan bahwa Program KIA di Kabupaten TTU telah dilaksanakan dengan dasar hukum yang kuat sesuai Permendagri No. 2 Tahun 2016. Namun, pencapaian tujuan program belum optimal. Integrasi, dalam hal ini Meskipun sistem administrasi kependudukan di Kabupaten TTU, termasuk SIAK, menunjukkan integrasi yang baik dalam mengelola data KIA, efektivitas program KIA terhambat oleh masalah sosialisasi dan koordinasi. Prosedur sosialisasi yang kurang optimal, keterbatasan sumber daya, dan aksesibilitas yang sulit di daerah terpencil mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat. Adaptasi, dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten TTU meskipun ada peningkatan jumlah KIA di Kabupaten TTU dari tahun 2022 ke 2023, Disdukcapil TTU masih menghadapi tantangan dalam adaptasi terhadap perubahan dan kebutuhan yang dinamis.

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang Efektivitas Pelayanan Kartu Identitas Anak Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara lalu menganalisa menjadi hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memberikan rekomendasi yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk memperbaiki sosialisasi, merekrut

Sumber Daya Manusia, meningkatkan sarana prasarana, mengembangkan sistem teknologi, memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas pelayanan.

2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih jauh tentang efektivitas pelayanan kartu identitas anak di kabupaten TTU sebagai upaya terlaksananya pelayanan Kartu Identitas Anak secara efektif. Peneliti dapat mencari masalah yang lebih luas, sehingga Efektivitas Pelayanan KIA ini dapat disempurnakan dalam pelaksanaan pelayanan Kartu Identitas Anak secara efektif.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada pihak Universitas Timor, dan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah memfasilitasi penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, A. Chaedar. 2006. Pokoknya Kualitatif. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bogdan, Biklen, 1982 Pengantar studi Penelitian, PT ALFABETA, Bandung.
- Gibson, J.L. Ivanicevich, J.M and Donnelly. J. 1989. Organisasi and Manajemen Perilaku Struktur Proses. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Gie, The Liang. 2007. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta : Liberty
- Handoko, Tarsisius H. 1984. Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi. Yogyakarta: BPFE.
- Lewis, Carol W., dan Stuart C. Gilman. 2005. The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide. Market Street, San Fransisco: Jossey-Bass
- Martani and Lubis, 2007. Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press
- Miller, J. N. dan J. C. Miller. 2005. Chemometrics for Analytical Chemistry. Analytical Chemistry
- Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Konsep dan Aplikasi, Proses Kebijakan Publik, Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik. Alfabeta. Bandung
- Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Pasolong, Harbani. 2013. Teori Administrasi Publik. Yogyakarta: Alfabeta
- Roth, Gabriel Joseph, 1926, The Privat Provision of Public Service in Developing Country. Washington DC: Oxford University Press.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2014. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sondang P. Siagian. 1987. Manajemen Modern. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Steers, Richard M. 2012. Efektivitas Organisasi Perusahaan. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sutarto. 2009. Dasar-Dasar Organisasi. Yogyakarta: UGM press.
- Tangkilisan, Hessel N.S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT. Grasindo.
- Thoha, Miftah. 2008. Perilaku Organisasi (Konsep, Dasar, dan Aplikasinya). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persad.
- Winardi. 2004. Teori Organisasi Dan Pengorganisasian. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Yayat M. Herujito. 2001. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: P.T. Grasindo
- Sumber Lain
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pelayanan umum
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak” 147.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketegasan atas perlindungan identitas anak

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependuduka
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dengan” 53, no. 9 (2017): 1689–1699.
- GOBEL, N. Y. (2022). Efektivitas Pelayanan Kartu Identitas Anak Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Pohuwato Provinsis Gorontalo (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Kasriati. (2021). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. Skripsi. Universitas Muhammadiyah: Makassar.
- Niningsih, S. (2023). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya.
- Rahmawati, L., Agustino, L., & Ismanto, G. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2017 (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Sidauruk, D. F. (2020). Penerapan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Di Kota Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
-

